



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
SUB UNIT KERJA : KEPALA LEMBAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOH. SUHAILI FADIL THOHIR**
2. Jabatan : **BUPATI LOMBOK TENGAH**
3. NHK : **39772**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.454.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000		
2. Tanah Seluas 11.500 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
3. Tanah Seluas 2.540 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 125.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 855 m2/100 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000		
5. Tanah Seluas 269 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 269.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	445.000.000
1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER JEEP Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2. MOBIL, NISSAN SERENA MINIBUS Tahun 1900, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
3. MOTOR, KAWASAKI LX 150C (KLX150S) Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	425.250.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	488.983.283
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---



Sub Total	Rp.	2.813.233.283
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.813.233.283

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **14 Oktober 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.